



**PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA
BERKELANJUTAN DI PROVINSI NTB**

*ENVIRONMENTAL PROTECTION IN SUSTAINABLE TOURISM
DEVELOPMENT POLICY IN NTB PROVINCE*

Rahmadani

Universitas Mataram,

e-mail: rahmadanishmh@unram.ac.id

Ashari

Universitas Mataram,

e-mail: ashari05@unram.ac.id

Rachman Maulana Kafrawi

Universitas Mataram,

e-mail: rachmanmaulana@unram.ac.id

Agung Setiawan

Universitas Mataram,

e-mail: agungsetiawan@unram.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi kebijakan pengembangan pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang mengacu kepada konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan (Sustainable Tourism) dimana fokus menyoroti aspek perlindungan lingkungan hidup dalam kerangka regulasi kebijakan. Penelitian dilakukan pada tataran normatif dan implementatif dengan menganalisis kebijakan pengembangan pariwisata di Provinsi NTB, dalam rangka mengetahui sejauh mana aspek perlindungan lingkungan hidup termanifestasi dan bersesuaian dengan konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan. Penelitian dilakukan dengan metode normatif-empiris yakni memadukan unsur hukum secara normatif yang didukung penambahan data atau unsur empiris (realisasi kebijakan). Pendekatan yang digunakan yakni pendekatan konseptual, peraturan perundang-undangan, dan pendekatan empiris terkait fakta implementasi kebijakan. Jenis data yang digunakan meliputi data primer berupa dokumentasi laporan kinerja dan evaluasi Dinas Pariwisata terkait realisasi rencana strategis pembangunan pariwisata di NTB. Data sekunder dokumen peraturan perundang-undangan, kebijakan rencana strategis dan rencana kerja pariwisata NTB, serta berupa literatur-literatur ilmiah yang relevan. Data-data terkait realisasi/pelaksanaan kebijakan diperoleh dari dokumen/arsip/laporan evaluasi. Data dikumpulkan dengan studi kepustakaan (study literature) dan dilakukan analisis secara kualitatif, disajikan secara deskriptif.

Kata Kunci: Analisis Kebijakan Publik; Pariwisata Berkelanjutan; Perlindungan Lingkungan Hidup

Abstract

This study explores the development of tourism policy in the Province of West Nusa Tenggara (NTB), guided by the concept of sustainable tourism development, emphasizing environmental protection within the framework of regulatory policy. The research examines both normative and implementation levels by analyzing tourism development policies in NTB Province, aiming to assess the extent to which environmental protection aspects are manifested and aligned with the principles of sustainable tourism development. The study employs a normative-empirical method, integrating normative legal analysis with empirical elements, particularly data reflecting policy implementation. The approaches used include conceptual, statutory and regulatory approach, and an empirical approach regarding the factual implementation of policy. The data used consist of primary data in the form of performance reports and evaluation documents from the NTB Tourism Office related to the realization of strategic tourism development plans in the region. Secondary data include statutory regulations, policy documents such as strategic plans and tourism work plans of NTB Province, as well as relevant academic literature. Data on policy implementation were obtained through official documents, archives, and evaluation reports. Data collection was conducted through literature study, and the analysis was carried out qualitatively and presented descriptively.

Keywords: *Public Policy Analysis; Sustainable Tourism; Environmental Protection*

A. PENDAHULUAN

Komoditas pariwisata telah menjadi *backbone* perekonomian Indonesia dalam tiga tahun terakhir. Pemerintah menargetkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional meningkat menjadi 15% pada tahun 2019.¹ Target tersebut mendorong dikembangkannya pariwisata di daerah-daerah yang memiliki potensi pariwisata seperti di Pulau Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kegiatan kepariwisataan dapat menjadi solusi untuk mengeluarkan masyarakat dari jurang kemiskinan. Beberapa daerah kota/kabupaten telah berhasil menggunakan pariwisata untuk mengembangkan daerahnya. Namun pemanfaatan sumber daya pariwisata juga mesti selaras dengan pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya semata fokus pada pembangunan ekonomi tapi juga *concern* pada perlindungan kelestarian lingkungan hidup dan pembangunan secara sosial budaya.²

Pembangunan dan/atau pengembangan pariwisata NTB tertuang dalam visi-misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB, dengan *tagline* membangun NTB Gemilang 2019-2023. Program startegis tersebut selanjutnya diatur dalam peraturan Daerah No. 7 tahun 2013 tentang Rencana Induk Pariwisata Daerah (Riparda) 2013-2028 yang menekankan pada empat aspek pembangunan kepariwisataan, yaitu destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata dan organisasi kepariwisataan.³

Sejumlah strategi pun dilakukan dalam mengembangkan pariwisata di NTB dengan mengacu pada pembangunan pariwisata berkelanjutan. Langkah dan strategi tersebut diantaranya. Pertama, *preparing*, yaitu mengambil langkah taktis sejak dini. Kedua

1 Sri Nurhayati Qodriyatun, "Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Karimunjawa," *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial* 9, no. 2 (March 26, 2019): 240–59, <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v9i2.1110>.

2 Arief Setijawan, "Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan dalam Perspektif Sosial Ekonomi," *Jurnal Planoeearth* 3, no. 1 (February 28, 2018): 7, <https://doi.org/10.31764/jpe.v3i1.213>.

3 Nur Nur Imansyah, "Ntb Dorong Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan.," *Antaraneews*, n.d., <https://www.antaraneews.com/berita/2014731/ntb-dorong-pengembangan-pariwisata-berkelanjutan>.

repositioning, reposisi menuju destinasi pariwisata berkelanjutan dan ketiga *engaging*, menjadikan momen yang tepat untuk membangun 'kerinduan' akan berwisata. Dengan hal itu pemerintah provinsi NTB bertekad pembangunan pariwisata yang dilakukan harus pariwisata yang berkelanjutan.⁴

Konsep pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*) diadopsi dari konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang pertama diperkenalkan oleh WCED (*World Commission on Environment and Development*) di Brundtland Report tahun 1987. *The World Tourism Organization* (UNWTO) dengan mengadopsi konsep tersebut mendefinisikan pariwisata berkelanjutan sebagai "*form of tourism that are consistent with natural, social, and community values and which allow both host and guest to enjoy positive and worthwhile interaction and shared experience* (bentuk pariwisata yang selaras dengan alam, dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat, di mana antara kedua belah pihak yaitu tuan rumah dan tamu saling menikmati dan saling berbagi pengalaman baru di antara mereka).⁵

Ada tiga komponen yang harus dipenuhi dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan menurut Heillbronn sebagaimana dikutip dari Tamaratika dan Rozyidie⁶, yaitu berkelanjutan secara lingkungan, berkelanjutan secara ekonomi, dan berkelanjutan secara sosial budaya. Berkelanjutan secara lingkungan dilakukan melalui pemanfaatan sumber daya lingkungan secara optimal melalui pembatasan sumber daya, mempertahankan proses ekologi, dan menjaga kelestarian serta keberadaan warisan alam dan keanekaragaman hayati pada destinasi wisata. Berkelanjutan secara ekonomi dilakukan dengan mengurangi tingkat kemiskinan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja. Sedangkan berkelanjutan secara sosial budaya dilakukan melalui menjaga keaslian sosial budaya masyarakat setempat dengan aturan dan ketentuan yang disepakati bersama, pelestarian nilai warisan budaya dan adat setempat, serta meningkatkan toleransi dan pemahaman antarbudaya.

Sehingga, pembangunan pariwisata yang berbasis sumber daya alam dan budaya yang tidak memperhatikan aspek kelestarian lingkungan maupun budaya pada akhirnya akan berdampak negatif, karena pada dasarnya sumber daya alam dan lingkungan memiliki kapasitas daya dukung yang terbatas. Artinya pembangunan yang berbasis pada pertumbuhan ekonomi saja dan tidak memperhatikan kapasitas sumber daya alam dan lingkungan akan menyebabkan permasalahan pembangunan dikemudian hari.⁷ Berbagai permasalahan lingkungan kemudian menjadi kritik terhadap pencapaian dari pembangunan ekonomi melalui pariwisata dan selanjutnya secara umum menjadi dasar pentingnya pembangunan pariwisata berkelanjutan yang tidak hanya mementingkan faktor pertumbuhan ekonomi, tapi juga secara esensial memprioritaskan elemen lingkungan (alam) hidup dan faktor sosial budaya yang merupakan tiga indikator utama pembangunan berkelanjutan.

4 Nur Imansyah.

5 "Report of the World Commission on Environment and Development- Our Common Future," n.d.

6 Fenilia Tamaratika and Arief Rosyidie, "INKORPORASI KEARIFAN LOKAL DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA DI LINGKUNGAN PANTAL," *Jurnal Sositologi* 16, no. 1 (April 29, 2017): 125–33, <https://doi.org/10.5614/sostek.itbj.2017.16.1.10>.

7 A.H. Rahadian, "Strategi Pembangunan Berkelanjutan," in *Prosiding Seminar STIAMI*, vol. 3, 1, 2016, 47, https://www.academia.edu/36168647/Strategi_pembangunan_berkelanjutan_AML.

Pelaksanaan aktivitas pariwisata di Provinsi NTB sendiri menunjukkan adanya permasalahan lingkungan hidup yang cukup signifikan dan patut menjadi *concern* para *stakeholder*, seperti: Permasalahan Sampah di daerah wisata Gunung Rinjani;⁸ Pencemaran lingkungan pantai Lombok;⁹ Persoalan sampah di Desa Wisata Long Baloq;¹⁰ dan hingga ancaman kerusakan ekosistem dan perubahan iklim.¹¹

Berangkat dari uraian latar belakang tersebut artikel ini mencoba merumuskan masalah yang akan dijawab dan dielaborasi, kedalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: Bagaimana arah kebijakan dan strategi pembangunan pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Barat? dan seperti apa urgensi perlindungan lingkungan hidup dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*) di Provinsi NTB?

Diketahui bahwa salah satu aspek dan indikator pembangunan berkelanjutan adalah keberlanjutan secara lingkungan, berdasarkan hal tersebut maka tujuan dari artikel penelitian untuk menyoroti dan mengulas bahasan terkait seperti apa aspek perlindungan lingkungan hidup pada kebijakan dan strategi pengembangan pariwisata di provinsi Nusa Tenggara Barat, sejauh mana urgensi perlindungan lingkungan hidup termanifestasi dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*) di NTB, dilihat dari kerangka (regulasi) kebijakan dan terealisasi dalam praktik pelaksanaannya.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Hukum Normatif-Empiris. Penelitian hukum normatif-empiris yaitu penelitian yang memadukan unsur hukum normatif yang didukung penambahan data atau unsur empiris sebagai bagian dari implementasi ketentuan yang bersifat normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan, dokumen kebijakan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹² Penelitian hukum empiris dilakukan dengan mengadakan observasi dan/atau meneliti suatu proses realisasi (implementasi) yang dapat berupa dampak dari suatu penerapan aturan kebijakan. Pendekatan yang digunakan yakni pendekatan konseptual, peraturan perundang-undangan, dan pendekatan empiris terkait fakta implementasi kebijakan. Jenis data yang digunakan adalah data primer berupa peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan perencanaan strategis pembangunan pariwisata di NTB. Data sekunder berupa literatur-literatur ilmiah yang relevan, serta data terkait realisasi/pelaksanaan kebijakan diperoleh dari dokumen/arsip/laporan evaluasi. Data dikumpulkan dengan

8 “Kerusakan Lingkungan Pariwisata Di Taman Nasional Gunung Rinjani,” n.d.

9 Putu Arya Reksa Anggratyas, “Permasalahan Sampah di Lingkungan Pantai Terhadap Kunjungan Kapal Pesiar Ke Pulau Lombok” (SocArXiv, October 10, 2024), <https://doi.org/10.31235/osf.io/sh2tf>.

10 M Gilang Nugraha, Rizal Kurniansah, and Sri Susanty, “ANALISIS SAPTA PESONA PADA DAYA TARIK WISATA LOANG BALOQ KOTA MATARAM,” *Journal Of Responsible Tourism* 2, no. 1 (August 2, 2022): 97–100, <https://doi.org/10.47492/jrt.v2i1.1902>.

11 Anang Taofik Kusmawan, “PENGARUH PERUBAHAN IKLIM TERHADAP KEGIATAN WISATA BAHARI DI GILI TRAWANGAN” 5 (2013).

12 Soerjono Soekanto and Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Rajagrafindo Persada: Jakarta, 2006).

studi kepustakaan (*study literature*) terkait dan dilakukan analisis secara kualitatif, disajikan secara deskriptif.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Pariwisata di Provinsi NTB

a. Uraian Umum Pembangunan Pariwisata NTB

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi pertumbuhan kegiatan ekonomi melalui sektor pariwisata. NTB dengan dua pulau besar Lombok dan Sumbawa kaya akan budaya dan panorama keindahan alamnya yang sangat berpeluang menjadi destinasi/objek wisata yang unggul untuk dipromosikan kepada khalayak. Pertumbuhan ekonomi dapat didorong melalui keran sektor pariwisata karena dapat membuka peluang investasi, pasar tenaga kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat hingga berdampak secara mikro dan makro dalam tataran negara. Maraknya negara-negara mempromosikan negaranya sebagai objek destinasi wisata menunjukkan adanya kemajuan ekonomi sebagai hasil positif dari kegiatan tersebut.

Daerah yang memiliki potensi sumber daya pariwisata yang unggul harus dimanfaatkan dan dilestarikan oleh karenanya kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan pariwisata merupakan hal yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Sektor pariwisata, merupakan salah satu urusan pemerintahan pilihan (konkuren) bagi daerah.¹³ Daerah yang memiliki sumber daya pariwisata yang unggul bertanggung jawab untuk melakukan perencanaan dan pengembangan sektor tersebut dalam konteks pembangunan daerah yang diselaraskan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional.¹⁴

Menyikapi hal tersebut Pemerintah Provinsi NTB menjadikan pariwisata sebagai program strategis dan unggulan daerah sebagaimana tertuang dalam visi-misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB, membangun NTB Gemilang 2019-2023.¹⁵ Selanjutnya RPJMD tersebut ditindaklanjuti dengan menuangkan program strategis pengembangan pariwisata NTB dalam peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2013 tentang Rencana Induk Pariwisata Daerah (Riparda) 2013-2028,¹⁶ yang menekankan pada empat aspek pembangunan kepariwisataan, yaitu destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata dan organisasi kepariwisataan. NTB dinobatkan sebagai “Pintu Gerbang Pariwisata Nasional” menjadikan NTB sebagai salah satu destinasi pariwisata unggulan di Indonesia yang diperhitungkan dan akan memiliki daya saing. Berdasarkan capaian sasaran kinerja, angka wisatawan berkunjung per 2023 mengalami peningkatan dan realisasinya melampaui target yang ditetapkan.¹⁷

Dalam urusan pembangunan di sektor pariwisata, Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat berperan penting dalam menyelenggarakan program pembangunan kepariwisataan yang terintegrasi dalam pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan

13 “Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah,” 23 § 12 (2014).

14 Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

15 “Perda Nomor 1 Tahun 2019 Tentang RPJMD NTB 2019-2023,” n.d.

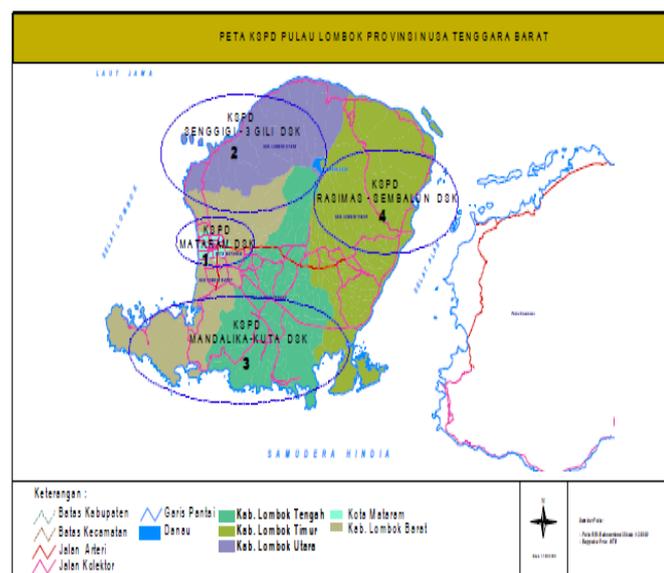
16 “Perda Nomor 7 Tahun 2013. Tentang RIPPARDA,” n.d.

17 Dokumen Rencana Strategis Kepariwisata Daerah NTB 2019-2023, Dinas Pariwisata NTB, 2023.

tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai budaya dan kearifan lokal serta lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan pada target sasaran pembangunan kepariwisataan periode 2024-2026 sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat dituntut untuk lebih berperan dalam rangka memperkuat jati diri dan karakter Masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur.¹⁸

Sektor pariwisata berbasis alam dan aneka budaya menjadi daya tarik di Provinsi NTB. Potensi destinasi objek wisata dapat dijumpai di wilayah NTB yang terdiri dari Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Pulau Lombok terdapat potensi wisata Pantai Senggigi dan Gili Trawangan, sedangkan di Pulau Sumbawa terdapat potensi wisata Pulau Moyo. Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan sektor pariwisatanya akan sangat mendukung penghasilan atau devisa negara.

Terdapat berbagai kawasan-kawasan pariwisata sebagai destinasi wisata unggulan yang sangat diminati oleh wisatawan. Sebagai bagian dari langkah strategi pembangunan kepariwisataan, pemerintah daerah Provinsi NTB menetapkan pemetaan wilayah Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Provinsi (KSPD) NTB. Adapun gambaran pembagian Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Provinsi NTB di Pulau Lombok dibagi ke dalam 4 KSPD yaitu: Mataram dan sekitarnya; Senggigi-Tiga Gili dan sekitarnya; Kuta Mandalika dan sekitarnya; Rasimas-Sembalun dan sekitarnya.

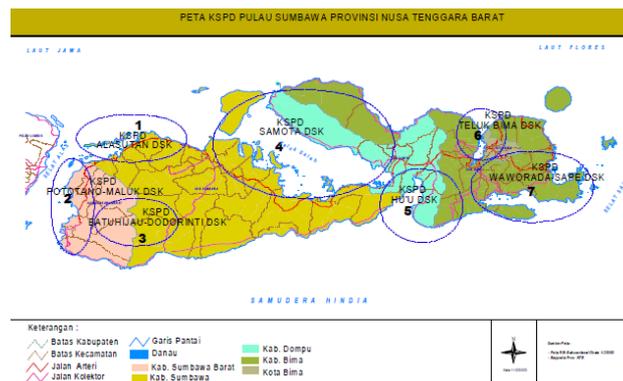


Gambar 1. KSPD Pulau Lombok NTB

Sumber: Lampiran III Perda No. 7 Tahun 2013 tentang RIPPARDA NTB 2013-2028.

Selanjutnya pembagian Kawasan Strategis Pariwisata Daerah di Pulau Sumbawa dan sekitarnya terbagi ke dalam 7 KSPD yakni: Alasutan dan sekitarnya; Pototano-Maluk dan sekitarnya; Batu Hijau-Dodorinti dan sekitarnya; Samota (Teluk Saleh-Moyo-Tambora) dan sekitarnya; Hu'u dan sekitarnya; Teluk Bima dan sekitarnya; Waworada-Wane dan sekitarnya; Sape-Pulau Sangiang dan sekitarnya.

18 "RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024," n.d.



Gambar 5. KSPD Pulau Sumbawa NTB

Sumber: Lampiran III Perda No. 7 Tahun 2013 tentang RIPPARDA NTB 2013-2028.

Berdasarkan gambar 1 dan 2 menunjukkan bahwa KSPD dibagi ke dalam dua wilayah besar, Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Dari masing-masing pulau tersebut dibagi ke dalam beberapa KSPD dan setiap KSPD terbagi lagi kedalam beberapa wilayah-wilayah Kawasan wisata secara lebih rinci dapat dilihat dalam Lampiran III Perda No. 7 Tahun 2013 tentang RIPPARDA NTB 2013-2028. Pembagian dan pemetaan tersebut dimaksudkan untuk memudahkan dalam penyusunan perencanaan pembangunan, pelaksanaan dan evaluasi dari program pembangunan kepariwisataan di NTB. Sektor pariwisata NTB pada masing-masing KSPD memiliki peluang dan tantangan pengembangan tersendiri.

b. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pariwisata NTB

Pembangunan kepariwisataan memiliki peranan penting dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja, mendorong pemerataan kesempatan berusaha, mendorong pemerataan pembangunan serta memberikan kontribusi bagi daerah dan negara yang dihasilkan dari kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara, sehingga dapat berperan dalam mengentaskan kemiskinan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pembangunan kepariwisataan juga berperan dalam upaya meningkatkan citra daerah ataupun bangsa dan mendorong kesadaran serta kebanggaan masyarakat terhadap kekayaan alam dan budaya.

Pembangunan Kepariwisataan daerah merupakan rangkaian upaya pembangunan integratif yang melibatkan berbagai sektor pendukung yang dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menambah pendapatan daerah. Pembangunan Pariwisata di Pulau Lombok memang juga dilaksanakan dalam rangka mendorong dan meningkatkan Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Pariwisata merupakan industri kunjungan yang memiliki dampak *multiflier effect* yang sangat tinggi. Pariwisata mengundang berbagai pengunjung baik dalam (*domestic*) maupun dari luar negeri.¹⁹

Mekanisme pertumbuhan dan pemerataan ekonomi setidaknya terjadi melalui kunjungan para wisatawan yang datang baik untuk berlibur maupun dengan maksud yang lain, yang pastinya akan mengeluarkan berbagai pembiayaan untuk memenuhi berbagai kebutuhannya selama berada didaerah tersebut. Sehingga hal tersebut dapat menjadi keran pertumbuhan kegiatan ekonomi di dalamnya. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pariwisata NTB merupakan hal yang sangat penting dilakukan.

19 Aos Kuswandi, "STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBANGUNAN PARIWISATA DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT," *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi* 8, no. 2 (December 21, 2020): 90–113, <https://doi.org/10.34010/agregasi.v8i2.3817>.

Kebijakan dan startegis yang jelas efektif dan mampu menyelesaikan masalah adalah hal yang sangat diperlukan.

RIPARDA merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah NTB, sebagai instrumen tindak lanjut dari Rencana Startegi Pembangunan Daerah pada sektor Pariwisata Pemerintah yang diformulasikan dalam bentuk Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2013 tentang Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPARDA). Kebijakan ini menjadi acuan pelaksanaan program pembangunan dan pengembangan pariwisata di NTB. Kebijakan-kebijakan lain terkait pengembangan pariwisata di NTB yakni, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Desa Wisata, dan kebijakan lain sebagai tindak lanjut dalam tataran teknis operasional pelaksanaan kegiatan pariwisata yang menjadi otoritas Dinas Pariwisata berupa: Rencana Startegis (Renstra) dan Rencana Kerja Kepariwisataan Tahunan Dinas provinsi NTB.

Hasil analisis kebijakan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa arah kebijakan dan strategi kepariwisataan NTB berdasarkan RPJMD 2019-2023, sebagaimana tergambar pada indikasi program pembangunan pariwisata NTB yang kemudian dibagi ke dalam tiga tahapan pembangunan. **Tahap I** Program Pembangunan Kepariwisataan tahun 2014-2018; **Tahap II** Program Pembangunan Kepariwisataan tahun 2019-2023; dan **Tahap III** Program Pembangunan Kepariwisataan Tahun 2024-2028, secara detail terurai dalam table berikut:

Tabel 1. Program Pembangunan Kepariwisataan tahun 2014-2018;

No.	Tahapan	Uraian
1.	Tahap I (2014-2018)	a. mengembangkan diversifikasi atau keragaman Daya Tarik Wisata dalam berbagai tema terkait yang kreatif dan inovatif; b. memperkuat upaya konservasi sumber daya Wisata dan lingkungan; c. meningkatkan pemahaman, dukungan dan partisipasi masyarakat sadar Wisata dalam mewujudkan saptapesona bagi terciptanya iklim kondusif Kepariwisataan; d. mengembangkan model-model promosi dan pemasaran Kepariwisataan dalam memperluas jaringan pasar, baik pasar Wisatawan nusantara maupun Wisatawan mancanegara; e. mengembangkan fasilitasi, regulasi, insentif dan disinsentif untuk pengembangan usaha Pariwisata; dan f. optimalisasi kemitraan usaha Pariwisata antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten /Kota, swasta dan masyarakat.

2.	Tahap II (2019-2023)	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan inovasi dan kapasitas Daya Tarik Wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan kawasan Pariwisata Daerah;b. meningkatkan kualitas dan kuantitas moda, sarana prasana, dan sistem transportasi darat, udara dan perkeretaapian sekaligus pengembangan sistem transportasi multimoda dan antarmoda yang aman, nyaman, lancar dan berbudaya;c. mengembangkan paket Wisata terpadu antar obyek dan antar daerah yang didukung oleh meningkatnya dukungan sektor lain (perhubungan, pendidikan, perdagangan, jasa, pertanian, industri, perhotelan) terhadap sektor Pariwisata;d. meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam Kepariwisataan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat melalui Kepariwisataan;e. mengembangkan citra Kepariwisataan Daerah sebagai Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman dan berdayasaing;f. meningkatkan kapasitas/skill serta produk layanan usaha ekonomi masyarakat dibidang Pariwisata; dang. standarisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia dan Industri dibidang Pariwisata.
----	-----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3	Tahap III (2024-2028)	<ul style="list-style-type: none"> a. terwujudnya tujuan Wisata yang inovatif, aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu meningkatkan pendapatan Daerah dan kesejahteraan masyarakat; b. terwujudnya pemasaran Pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggungjawab untuk meningkatkan kunjungan Wisatawan baik nusantara maupun mancanegara; c. terwujudnya industri Pariwisata yang berdayasaing, kredibel, mampu menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggungjawab atas kelestarian dan keseimbangan lingkungan alam dan sosialbudaya; d. terwujudnya organisasi Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, swasta, dan masyarakat, berkembangnya Sumber Daya Manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien; e. terwujudnya masyarakat sadar Wisata untuk mendukung tercapainya Sapta Pesona; dan f. terwujudnya Daerah sebagai daerah tujuan Wisata berbasis budaya terkemuka di Asia Tenggara yang mempunyai ciri khas dan kekhususan daerah dengan keanekaragaman Daya Tarik Wisata dan budaya.
---	------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber: Lampiran IV Perda No. 7 Tahun 2013 Provinsi NTB setelah diolah penulis.²⁰

Pada Tahapan I, prioritas pembangunan mengarah pada upaya pengembangan objek dan daya tarik wisata yang beragam, konservasi sumber daya wisata dan lingkungan, meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat untuk sadar wisata, mengembangkan model promosi dan pemasaran, pengembangan sector wisata dengan berbagai fasilitas dan perangkat regulasi serta optimalisasi kemitraan usaha pariwisata daerah.

Pada Tahapan II, program pembangunan pariwisata daerah fokus pengembangan inovasi dan kapasitas daya tarik wisata, moda transportasi wisatawan, mengembangkan paket wisata terpadu, keterlibatan masyarakat untuk mendorong kesejahteraan, membangun citra kepariwisataan dengan peningkatan kemampuan dan keterampilan pelaku usaha dan masyarakat pelaku wisata dan standarisasi sumber daya manusia dan

20 “Perda Nomor 7 Tahun 2013. Tentang RIPPARDA.”

industri dibidang pariwisata. Fokus pada arah kebijakan ini, berbasis pada pengembangan sumber daya manusia pelaku usaha maupun masyarakat pelaku wisata atau tenaga kepariwisataan dalam membangun citra pariwisata aman, nyaman dan berdaya saing.

Pada Tahapan III, arah kebijakan lebih menekankan pada target capaian-capaian tujuan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya seperti: tercapainya tujuan wisata yang inovatif, aman, nyaman, menarik dan **berwawasan lingkungan** dan berdampak pada peningkatan PAD dan kesejahteraan masyarakat, tercapainya pemasaran pariwisata yang menghasilkan peningkatan jumlah wisatawan, tercipta industri pariwisata yang memiliki daya saing, kredibel menggerakkan pola kemitraan usaha, dan **bertanggung jawab untuk kelestarian dan keseimbangan lingkungan alam** dan sosial budaya masyarakat, terwujud sinergitas otoritas kelembagaan pariwisata, mekanisme regulasi dan operasional yang efektif dan efisien serta berkembangnya sumber daya manusia yang sadar wisata yang **mendorong kepariwisataan yang berkelanjutan**, dan terwujudnya pariwisata yang berbasis budaya terkemuka di Asia Tenggara yang memiliki kekhasan dengan keanekaragaman daya Tarik wisata dan budaya di NTB.

Berdasarkan uraian Indikasi Program Pembangunan Kepariwisata Daerah tersebut, yang dicanangkan untuk tahun 2014-2028, terlihat bahwa orientasi pembangunan yang mengarah dan signifikan pada aspek keberlanjutan lingkungan hidup baru mulai disebutkan pada tahapan III, yakni pada periode 2024-2028 dari total adanya tiga tahapan. Sehingga sasaran yang menjadi fokus kinerja berjalan sementara ini masih pada proses tahapan Tahap I (2014-2018) dan Tahap II (2019-2023). Sehingga jika menelaah arah kebijakan, sasaran, dan strategi pada pengembangan pariwisata NTB yang berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) pada tahun 2019-2023, nampak bahwa arah dan strategi yang ditempuh (masih) fokus pada pengembangan daya tarik pariwisata (destinasi pariwisata dan atraksi pariwisata); revitalisasi desa miskin menjadi desa wisata dan pengembangan desa wisata yang sudah ada menjadi lebih optimal dan menghasilkan sumber pendapatan bagi masyarakat.²¹

Disamping itu, **target utama** yang ingin dicapai pemerintah daerah Provinsi NTB di bidang pariwisata yang telah ditetapkan melalui Indikator Kinerja Daerah (IKD) berdasar pada RPJMD 2019-2023, yang selanjutnya menjadi acuan Dinas Pariwisata NTB 2023 dalam menyusun program dan kegiatan, indikator tersebut terdiri dari:²²

1. Pertumbuhan sektor kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Mimum);
2. Persentase Desa Wisata Yang Dikembangkan;
3. Rata-rata Lama Menginap Wisatawan;
4. Angka Kunjungan Wisatawan;
5. Persentase Geosite Yang Tertata;
6. Pertambahan Nilai PDRB sektoryang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum).

Adapun realisasi capaian IKD bidang pariwisata tersebut di tahun 2023 oleh Dinas Pariwisata NTB dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Bidang Pariwisata Tahun 2023

No.	Indikator Bidang Urusan	Tahun 2023	
		Target	Realisasi
1.	Jumlah Kunjungan Wisatawan	2,000,000	2,119,927

²¹ Kuswandi, "STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBANGUNAN PARIWISATA DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT."

²² "RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024."

2.	Peningkatan Persentase Destinasi Pariwisata Yang Minimal Berkembang	100%	94,95%
3.	Prosentase Pertumbuhan Jumlah Industri Pariwisata Yang Kredibel	20%	21%
4.	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang telah memiliki HaKI	40,21%	43,60%
5.	Peresentase SDM Penunjang Layanan Pariwisata Yang Tersertifikasi	75%	83,03%

Sumber: Dokumen Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Pariwisata NTB, setelah diolah penulis

Pada realisasi capaian indikator tersebut, rata-rata terlihat melampaui target kecuali pada bidang urusan peningkatan persentasi destinasi berkembang. Namun, jika ditinjau pada setiap bidang urusan ditemukan bahwa proses pengembangan dan/ataupengembanganpariwisatamasihberkutatpadabidang/urusanpengembangan objek destinasi, peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, pertumbuhan jumlah industri pariwisata dan pelaku usaha ekonomi kreatif, serta peningkatan standar SDM penunjang layanan parirwisata. Target indikator kinerja pariwisata belum mengarah secara signifikan pada upaya atau program yang secara sepesifik bersinggungan dengan aspek perlindungan lingkungan hidup, atau dengan kata lain fokus arah kebijakan dan strategi serta sasaran kinerja pembangunan masih pada level upaya pertumbuhan ekonomi (pengembangan infrastruktur, fasilitas dan sarana pariwisata) belum sampai pada tataran yang secara simultan mewujudkan kelestarian lingkungan dan alam yang berkelanjutan dalam upaya pembangunan sektor pariwisata yang berkelanjutan.

2. Analisis Urgensitas Perlindungan Lingkungan hidup dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan (*Sustainable Tourism*) di Provinsi NTB

a. Permasalahan lingkungan hidup (di) sektor pariwisata

Salah satu permasalahan krusial yang dihadapi dalam proses pembangunan yang berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi adalah bagaimana menghadapi *trade-off* antara pemenuhan kebutuhan pembangunan disatu sisi dan upaya mempertahankan kelestarian lingkungan disisi lainnya. (Rahardian, 2016:47) Pembangunan pariwisata yang berbasis sumber daya alam dan budaya yang tidak memperhatikan aspek kelestarian lingkungan maupun budaya pada akhirnya akan berdampak negatif, karena pada dasarnya sumber daya alam dan lingkungan memiliki kapasitas daya dukung yang terbatas. Artinya pembangunan yang berbasis pada pertumbuhan dan tidak memperhatikan kapasitas sumber daya alam dan lingkungan akan menyebabkan permasalahan pembangunan dikemudian hari.²³ Dapat dikatakan bahwa kurangnya perhatian pada elemen sumber daya lingkungan dalam proses pembangunan akan besar memberi dampak terhambatnya pembangunan yang keberlanjutan. Pertumbuhan ekonomi dan elemen sosial dan lingkungan harus selarasa dalam konsep pembangunan berkelanjutan “*Sustainable economic growth addresses three critical economic, environmental, and social factors. The economic element refers to sustainable economic growth that does not harm environmental and social interests.*”²⁴

²³ A.H. Rahadian, “Strategi Pembangunan Berkelanjutan,” in *Prosiding Seminar STIAMI*, vol. 3, 1, 2016, 47, https://www.academia.edu/36168647/Strategi_pembangunan_berkelanjutan_AML.

²⁴ Rahmadani, Ashari, and Putri Raodah, “The Public Participation and Sustainable Development Perspective on Zero Waste Policy in Mataram City, NTB,” *Unram Law Review* 72 (October 4, 2023): 161, <https://doi.org/10.29303/ulrev.v7i2.313>.

Berbagai permasalahan lingkungan kemudian menjadi kritik terhadap pencapaian dari pembangunan ekonomi melalui pariwisata dan selanjutnya secara umum menjadi dasar pentingnya pembangunan pariwisata berkelanjutan yang tidak hanya mementingkan faktor pertumbuhan ekonomi, tapi juga secara esensial memprioritaskan elemen lingkungan (alam) hidup dan faktor sosial budaya yang merupakan tiga indikator utama pembangunan berkelanjutan. Konsep pembangunan berkelanjutan telah lama menjadi perhatian para ahli. Secara kesejarahan, istilah keberlanjutan (*sustainability*) dimulai sejak tahun 1798 oleh Malthus yang memiliki kekhawatiran akan ketersediaan lahan di Inggris akibat dari pertumbuhan penduduk yang pesat.

Satu setengah abad kemudian, Meadow dan kawan-kawan pada tahun 1972 menerbitkan publikasi berjudul *The Limit to Growth* (Meadow et al., 1972 dalam Rahardian, 2016:47) yang secara inti menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi akan sangat dibatasi oleh ketersediaan sumber daya alam. Dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam tersebut menurutnya, arus barang dan jasa yang dihasilkan dari sumber daya alam tidak akan selalu bisa dilakukan dengan secara terus menerus atau *on sustainable* basis.²⁵ Oleh karena itu, sangat penting pula kiranya menaruh perhatian besar pada upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup atau sumber daya alam di setiap agenda atau proyek-proyek pembangunan.

Ketika meninjau gambaran pencapaian pembangunan pariwisata yang hanya bertumpuh pada pertumbuhan ekonomi tidaklah cukup untuk menilai bahwa pembangunan pariwisata berkelanjutan di Provinsi NTB, karena secara konsep dan konstitusional, pariwisata suatu daerah, apabila ingin mewujudkan pariwisata berkelanjutan, maka dalam aktivitas pembangunannya harus mencakup pada 3 elemen indikator pembangunan pariwisata berkelanjutan, yakni berkelanjutan secara ekonomi, lingkungan dan sosial-budaya. Selain itu berpedoman pula pada beberapa aspek (destinasi) berkelanjutan yang termuat pada Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan yang terdiri dari; pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan; pemanfaatan ekonomi untuk masyarakat lokal; pelestarian budaya bagi masyarakat dan pengunjung; dan pelestarian lingkungan, yang dimana dalam peraturan ini telah memuat elemen indikator konsep pariwisata berkelanjutan.

Dalam tinjauan dan hasil analisis data sekunder (*study literature*) terkait dampak secara langsung maupun tidak langsung dari aktivitas pariwisata di Provinsi NTB menunjukkan adanya permasalahan lingkungan hidup yang patut menjadi atensi para *stakeholder* dalam pelaksanaan pembangunan pariwisata diantaranya berupa:

1) Permasalahan Sampah di Gunung Rinjani;

Disebutkan dari hasil penelitian *Kerusakan lingkungan Pariwisata Di Taman Nasional Gunung Rinjani Akibat Pembuangan Sampah Sembarangan*, bahwa terdapat permasalahan sampah yang timbul dan semakin menumpuk di area kawasan Gunung Rinjani sebagaimana hasil survey yang disebut dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 53 persen atau setara dengan 250 ton sampah merupakan sampah plastik yang sulit terurai dan secara permanen berpotensi mencemari ekosistem Taman Nasional Gunung Rinjani. Persoalan sampah adalah akibat dari kegiatan pendakian yang dilakukan oleh pengunjung atau wisatawan baik lokal maupun mancanegara yang memiliki kebiasaan membuang sampah sembarang tanpa adanya kesadaran lingkungan. Adapun pengelolaan sampah

25 A.H. Rahadian, "Strategi Pembangunan Berkelanjutan."

dilakukan oleh masyarakat dan instansi yang dibentuk pemerintah yaitu Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR) saat ini dengan melakukan pembakaran sampah, pengumpulan sampah di setiap pos pendakian serta pengangkutan sampah dari pos pendakian menuju kantor TNGR Resort Sembalun.²⁶

2) Pencemaran Lingkungan Pantai Pulau Lombok dengan Sampah;

Dalam tinjauan artikel penelitian disebut bahwa terjadi pencemaran di kawasan pantai dan perairan Pulau Lombok di Nusa Tenggara Barat oleh sampah plastik, yang berasal dari permukiman warga, kini mencapai taraf memprihatinkan. Dan menurut Bagus Windia Adnyane, inisiator dan Koordinator Acara Coral Triangle (CT), dikutip dalam penelitian bahwa kawasan perairan di sekitar Selat Lombok kini menumpuk sampah plastik asal daratan yang jumlahnya mencapai 15-20 ton per hari.²⁷

3) Persoalan Sampah di Desa Wisata Pantai Long Baloq Kota Mataram;

Permasalahan ini digambarkan dalam penelitian *Analisis Sapta Pesona Pada Daya Tarik Wisata Loang Baloq Kota Mataram*, dalam artikel disebutkan terdapat banyak sekali sampah berserakan dan banyak pengunjung membuang sampah tidak pada tempatnya disamping itu, fasilitas tempat pembuangan sampah sulit ditemukan, mengakibatkan area di sekitaran pantai menjadi sangat tidak bersih.²⁸

4) Ancaman Kerusakan Ekosistem dan Perubahan Iklim;

Salah satu masalah utama dalam pengembangan pariwisata berbasis lingkungan alam adalah potensi kerusakan ekosistem laut, terutama terumbu karang, yang disebabkan oleh aktivitas pariwisata, seperti *snorkeling*, *diving*, dan sampah laut. Di Gili Trawangan, pariwisata bahari menyebabkan degradasi terumbu karang dan perubahan ekosistem laut yang mengindikasikan penurunan kualitas lingkungan hidup dan menurunnya jumlah biota laut. Selain itu, ancaman dari perubahan iklim, yang memperburuk kondisi lingkungan wisata. Pulau-pulau kecil seperti Gili Trawangan diperkirakan terancam hilang akibat kenaikan permukaan laut dan perubahan iklim yang mempercepat erosi pantai. Kegiatan wisata tanpa regulasi yang ketat memperburuk kondisi lingkungan di pulau-pulau kecil ini.²⁹

b. Urgensitas perlindungan lingkungan hidup (keberlanjutan secara lingkungan) dalam pengembangan pariwisata di NTB

Berdasarkan uraian permasalahan lingkungan yang telah diuraikan sebelumnya. Maka, pembangunan dan pengembangan pariwisata semestinya tidak hanya berfokus pada tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi tapi juga bertujuan untuk melestarikan alam, lingkungan hidup dan sumber daya di dalamnya. Sebagaimana disebutkan bahwa *sustainability principles refer to the environmental, economic and socio-cultural aspects of tourism development, and a suitable balance must be established between these three*

26 "Kerusakan Lingkungan Pariwisata Di Taman Nasional Gunung Rinjani," n.d.

27 Putu Arya Reksa Anggratyas, "Permasalahan Sampah di Lingkungan Pantai Terhadap Kunjungan Kapal Pesiar Ke Pulau Lombok" (SocArXiv, October 10, 2024), <https://doi.org/10.31235/osf.io/sh2tf>.

28 M Gilang Nugraha, Rizal Kurniansah, and Sri Susanty, "ANALISIS SAPTA PESONA PADA DAYA TARIK WISATA LOANG BALOQ KOTA MATARAM," *Journal Of Responsible Tourism* 2, no. 1 (August 2, 2022): 97–100, <https://doi.org/10.47492/jrt.v2i1.1902>.

29 Anang Taofik Kusmawan, "PENGARUH PERUBAHAN IKLIM TERHADAP KEGIATAN WISATA BAHARI DI GILI TRAWANGAN" 5 (2013).

*dimensions to guarantee its long-term sustainability.*³⁰ Prinsip-prinsip berkelanjutan semestinya mengacu pada aspek lingkungan, ekonomi dan sosial budaya dari suatu pengembangan pariwisata, dan keseimbangan yang sesuai harus dibangun antara ketiga dimensi ini untuk menjamin keberlanjutan jangka panjangnya.

*Sustainable tourism should make optimal use of environmental resources that constitute a key element in tourism development, maintaining essential ecological processes and helping to conserve natural resources and biodiversity, respect the socio-cultural authenticity of host communities, conserve their built and living cultural heritage and traditional values, and contribute to inter-cultural understanding and tolerance, and Ensure viable, long-term economic operations, providing socio-economic benefits to all stakeholders that are fairly distributed, including stable employment and income-earning opportunities and social services to host communities, and contributing to poverty alleviation.*³¹

Dapat diketahui bahwa pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*) harus memanfaatkan secara optimal sumber daya lingkungan yang merupakan elemen kunci dalam pengembangan pariwisata, memelihara proses ekologi yang penting dan membantu melestarikan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, menghormati keaslian sosial budaya masyarakat tuan rumah, melestarikan warisan budaya dan nilai-nilai tradisional yang dibangun dan hidup mereka, dan berkontribusi pada pemahaman dan toleransi antar budaya dan memastikan operasi ekonomi jangka panjang yang layak, memberikan manfaat sosial-ekonomi kepada semua pemangku kepentingan yang terdistribusi secara adil, termasuk pekerjaan yang stabil dan peluang memperoleh pendapatan dan layanan sosial bagi masyarakat setempat, dan berkontribusi pada pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan penelusuran terhadap dokumen kebijakan Pembangunan pariwisata di NTB, secara normatif upaya pembanguan pariwisata telah diarahkan pada konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*) sebagaimana termanifestasi dalam Kebijakan Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPARDA); Perda Nomor 7 Tahun 2013. Identifikasi dan analisis yang dilakukan terhadap butir norma dalam peraturan kebijakan tersebut, ditemui muatan unsur pembangunan pariwisata berkelanjutan yang menekankan pada dimensi perlindungan lingkungan hidup sebagaimana termaktub pada:

1. Pasal 2 Ayat 5 Huruf c dan Ayat 6 huruf b:

(5): “Dalam mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui 4 (empat) misi pembangunan kepariwisataan daerah meliputi pengembangan:...c. Industri Pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya; dan” (6): “Tujuan pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah:...b. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya.”

2. Pasal 6 huruf a dan b:

“Arah Pembangunan Kepariwisataan Daerah meliputi: a. prinsip pembangunan Kepariwisataan yang berkelanjutan; b. orientasi pada upaya-upaya pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan;”

30 “WTO-UNEP, 2005, Making Tourism More Sustainable Part 1,” n.d.

31 “WTO-UNEP, 2005, Making Tourism More Sustainable Part 1.”

3. Pasal 11 huruf f:

KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b ditentukan dengan kriteria:...

- (f). memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;³²

Sedangkan pada tataran implementatif yang lebih teknis operasional **isu-isu strategis** yang diatasi oleh *stakeholder* dalam pengembangan kepariwisataan di NTB, ditinjau dari dokumen Renstra dan Renja serta Laporan Tahunan (realisasi) Dinas Pariwisata NTB, berdasarkan observasi dan analisis yang dilakukan ditemukan bahwa program sasaran dan rencana strategis pelaksanaan masih juga fokus dan berkuat pada bagaimana upaya-upaya mewujudkan aspek pertumbuhan ekonomi, seperti pengembangan destinasi-destinasi wisata, pembinaan sumber daya manusia dan menguatkan pendekatan kelembagaan, fokus program mewujudkan dan meningkatkan pengembangan Atraksi, Amenitas dan Aksesibilitas (3A) Pariwisata.

Hal ini sejalan dengan yang telah ditetapkan dalam IKD-RPJMD bahwa pembangunan pariwisata ditujukan untuk mewujudkan Misi-5 RPJMD Provinsi NTB tahun 2019-2023 yaitu NTB Sejahtera dan Mandiri melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi dengan sasaran pembangunan meningkatnya daya saing pariwisata. Sehingga dalam Pasal 2 Ayat (1) Perda tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah NTB disebutkan bahwa pembangunan pariwisata daerah meliputi: a. Destinasi Pariwisata; b. Pemasaran Pariwisata; c. Industri Pariwisata; d. Kelembagaan Kepariwisata. Ruang lingkup pembangunan pariwisata berkuat pada keempat hal tersebut.

Oleh karenanya, dalam konteks mengukur keberhasilan pelaksanaan urusan pariwisata sebagai tindak lanjut dari Misi RPJMD; Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan arah kebijakan RIPPANDA, Dinas Pariwisata Provinsi NTB sebagai instansi yang memiliki otoritas dalam pelaksanaan pengembangan pariwisata menetapkan 5 (lima) sasaran strategis berupa:³³

- a. Meningkatnya pemasaran pariwisata yang efektif dan efisien dengan indikator kinerja jumlah kunjungan wisatawan;
- b. Meningkatnya pembangunan dan pengembangan destinasi pariwisata rintisan menjadi destinasi pariwisata minimal berkembang dengan indikator kinerja Peningkatan Persentase Destinasi Pariwisata yang Minimal Berkembang;
- c. Meningkatnya pembangunan industri pariwisata yang kredibel dengan indikator kinerja Prosentase Pertumbuhan Jumlah Industri Pariwisata yang Kredibel;
- d. Meningkatnya nilai tambah ekonomi kreatif dengan indikator kinerja Persentase pelaku Ekonomi Kreatif yang telah memiliki HaKI;
- e. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme SDM pariwisata dengan indikator kinerja Persentase SDM penunjang layanan pariwisata yang tersertifikasi.

Adapun capaian atas sasaran tersebut, yang pula ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata Provinsi NTB di Tahun 2023, mengacu pada indikator:³⁴

- a. Jumlah Kunjungan Wisatawan yang Datang Berkunjung ke Nusa Tenggara Barat;
- b. Peningkatan Persentase Destinasi Pariwisata yang Minimal Berkembang;

32 "Perda Nomor 7 Tahun 2013. Tentang RIPPANDA."

33 "RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024."

34 "RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024."

- c. Persentase Pertumbuhan Jumlah Industri Pariwisata yang Kredibel;
- d. Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Telah Memiliki HaKI;
- e. Persentase SDM Penunjang Layanan Pariwisata yang Tersertifikasi.

Berdasarkan uraian capaian indikator dan realisasinya yang telah diuraikan sebelumnya, terlihat masih secara konsisten fokus pada aspek-aspek pembangunan yang mengarah pada peningkatan sumber daya pariwisata yang berbasis pada peningkatan yang menunjang aspek perekonomian. Maka jika mengacu pada konsep Pariwisata Berkelanjutan (*Sustainable Tourism*) masih belum nampak signifikan sepenuhnya terwujud dan terlaksana.

Sebagaimana diketahui bahwa konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan mengindikasikan tiga elemen kunci dalam pengembangannya. Ada tiga komponen yang harus dipenuhi dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan menurut Heillbronn sebagaimana dikutip dalam Tamaratika dan Rozyidie, yaitu berkelanjutan secara lingkungan, berkelanjutan secara ekonomi, dan berkelanjutan secara sosial budaya. Dalam konteks dimensi berkelanjutan secara lingkungan dilakukan melalui pemanfaatan sumber daya lingkungan secara optimal melalui pembatasan sumber daya, mempertahankan proses ekologi, dan menjaga kelestarian serta keberadaan warisan alam dan keanekaragaman hayati pada destinasi wisata. Dengan kata lain melakukan upaya pembangunan pariwisata dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi tanpa melupakan faktor kelestarian lingkungan yang menekankan urgensi perlindungan terhadapnya.

D. KESIMPULAN

Kebijakan dan strategi pengembangan pariwisata di provinsi NTB terlihat mengarah pada konsep pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*) sebagaimana termuat dalam norma/pasal aturan kebijakan Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPPARDA) dalam bentuk peraturan daerah dan selanjutnya ditindaklanjuti pada tataran yang lebih teknis dan operasional disusun Rencana Staregi (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (Renja) oleh Dinas Pariwisata. Pada tataran tindak lanjut, sasaran indikator program dan strategi, pembangunan pariwisata berkelanjutan belum sepenuhnya termanifestasi, selain karena indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah NTB yang terbagi dalam tiga tahapan dan masih dalam tahapan proses menuju pada arah pembangunan pariwisata berkelanjutan secara holistik.

Sehingga, fokus orientasi sasaran program dan startegis serta indikator pencapaiannya masih di seputar upaya pengembangan destinasi wisata, promosi wisata untuk menarik wisatwan berkunjung, pengembangan atraksi, aksesibilitas dan amenities (3A) pariwisata, dengan kata lain masih fokus pada upaya yang berorientasi menunjang sektor ekonomi atau meningkatkan perekonomian belum terlihat signifikan sasaran program, strategi dan indikator yang menekankan pada upaya perlindungan lingkungan hidup. Dengan kata lain fokus arah kebijakan dan strategi serta sasaran pembangunan pada tataran tindak lanjut berkuat pada level upaya pertumbuhan ekonomi belum secara simultan, konsentris dan signifikan mewujudkan kelestarian dan perlindungan

lingkungan dan alam serta aspek sosial-budaya di sisi lain dalam upaya pembangunan sektor pariwisata yang berkelanjutan.

Untuk menunjang upaya pembangunan pariwisata yang berkelanjutan (*sustainable tourism*) diperlukan sinergitas antar lembaga yang terkait untuk melakukan akselerasi proses pengembangan pariwisata berkelanjutan tersebut, misalnya dalam konteks fokus sasaran mewujudkan keberlanjutan secara lingkungan (upaya perlindungan lingkungan) Dinas Pariwisata NTB seyogyanya melakukan kerjasama/kolaborasi dengan dinas-dinas terkait dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup. Upaya kolaborasi tersebut didasari pada adanya aturan bersama antar instansi berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan produksi sampah dan limbah dari hasil kegiatan kepariwisataan, serta dampak lain terhadap lingkungan yang sekiranya berpotensi membahayakan kelestarian alam dan lingkungan hidup dalam konteks pembangunan pariwisata yang dimana hal ini dapat diantisipasi melalui upaya sinergitas tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- A.H. Rahadian. "Strategi Pembangunan Berkelanjutan." In *Prosiding Seminar STIAMI*, 3:47. 1, 2016. https://www.academia.edu/36168647/Strategi_pembangunan_berkelanjutan_AML.
- Anggratyas, Putu Arya Reksa. "Permasalahan Sampah di Lingkungan Pantai Terhadap Kunjungan Kapal Pesiar Ke Pulau Lombok." SocArXiv, October 10, 2024. <https://doi.org/10.31235/osf.io/sh2tf>.
- "Kerusakan Lingkungan Pariwisata Di Taman Nasioanal Gunung Rinjani," n.d.
- Kusmawan, Anang Taofik. "PENGARuH PERuBAHAN IKlim TERHADAP KEGIATAN WISATA BAHARI DI GIII TRAWANGAN" 5 (2013).
- Kuswandi, Aos. "STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBANGUNAN PARIWISATA DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT." *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi* 8, no. 2 (December 21, 2020): 90–113. <https://doi.org/10.34010/agregasi.v8i2.3817>.
- Nugraha, M Gilang, Rizal Kurniansah, and Sri Susanty. "ANALISIS SAPTA PESONA PADA DAYA TARIK WISATA LOANG BALOQ KOTA MATARAM." *Journal Of Responsible Tourism* 2, no. 1 (August 2, 2022): 97–100. <https://doi.org/10.47492/jrt.v2i1.1902>.
- Nur Imansyah, Nur. "Ntb Dorong Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan." *Antarnews*, n.d. <https://www.antarnews.com/berita/2014731/ntb-dorong-pengembangan-pariwisata-berkelanjutan>.
- "Perda Nomor 1 Tahun 2019 Tentang RPJMD NTB 2019-2023," n.d.
- "Perda Nomor 7 Tahun 2013. Tentang RIPPARDA," n.d.
- Qodriyatun, Sri Nurhayati. "Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Karimunjawa." *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial* 9, no. 2 (March 26, 2019): 240–59. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v9i2.1110>.
- Rahmadani, Ashari, and Putri Raodah. "The Public Participation and Sustainable Development Perspective on Zero Waste Policy in Mataram City, NTB." *Unram*

- Law Review* 72 (October 4, 2023): 161. <https://doi.org/10.29303/ulrev.v7i2.313>.
- “RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024,” n.d.
- “Report of the World Commission on Environment and Development- Our Common Future,” n.d.
- Setijawan, Arief. “Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan dalam Perspektif Sosial Ekonomi.” *Jurnal Planoearth* 3, no. 1 (February 28, 2018): 7. <https://doi.org/10.31764/jpe.v3i1.213>.
- Sri, Nurhayati Qodriyatun. “Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Di Karimunjawa.” *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 9 (2 Desember 2018 2018). <https://doi.org/https://doi.org/10.22212/aspirasi.v7i1.1084>.
- Soerjono Soekanto and Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajagrafindo Persada: Jakarta, 2006.
- Tamaratika, Fenilia, and Arief Rosyidie. “INKORPORASI KEARIFAN LOKAL DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA DI LINGKUNGAN PANTAI.” *Jurnal Sositologi* 16, no. 1 (April 29, 2017): 125–33. <https://doi.org/10.5614/sostek.itbj.2017.16.1.10>.
- Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, 23 § 12 (2014).
- “WTO-UNEP, 2005, Making Tourism More Sustainable Part 1,” n.d.